



The Role of the Nagari Government in Empowering Women Farmers Groups (WFG) Producing Processed Cinnamon Products in Nagari Malalak Barat

Natasya Aprilia¹, Fitri Eriyanti²

¹natasyaaprilia415@gmail.com, ²fitrieriyanti@gmail.com

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

ABSTRACT

This research is motivated by the significant potential of cinnamon commodities in Nagari Malalak Barat, Agam Regency, managed by the Women's Farmers Group (KWT) to produce various processed products. However, the empowerment efforts carried out by the Nagari Government still face several obstacles, such as the lack of policy support, limited market access, and insufficient continuous training. This study aims to describe the role of the Nagari Government in empowering KWT, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. The research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The results show that the role of the Nagari Government can be seen in its functions as a regulator, dynamizer, and facilitator, but its implementation has not been optimal. Supporting factors include the potential of the commodities and initial government support, while inhibiting factors include limited capital, technology, and regulations. Therefore, more concrete and sustainable strategies are needed to enhance the independence of KWT.

Keywords: Women's Farmers Group; Empowerment; Government; Role

PENDAHULUAN

Pemerintah berperan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang mendorong kemandirian dan pemanfaatan potensi lokal (Astuti, 2021). Dalam konteks otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan merancang program pemberdayaan sesuai kondisi wilayah. Di Sumatera Barat, sistem pemerintahan nagari memungkinkan pengelolaan berbasis adat dan potensi lokal sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. Nagari Malalak Barat, Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah sentra penghasil kayu manis dengan produksi tahunan mencapai 6.984 ton, yang dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat. Untuk meningkatkan nilai tambah, pemerintah nagari mendorong pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang mengolah kayu manis menjadi berbagai produk turunan seperti sirup, teh, pupuk cair, briket, dan kue-kue yang berbahan dasar kayu manis.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah lokal berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan kelompok tani. Raintung, et al., (2021) mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan dan pendampingan membatasi optimalisasi pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya. Afifah & Ilyas (2021) menemukan bahwa KWT Asri berhasil meningkatkan keterampilan dan kemandirian, meski belum berdampak signifikan pada ekonomi rumah tangga. Ekadina et al. (2022) menegaskan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisor mampu memperkuat produktivitas pertanian, namun belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah nagari dalam memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT) penghasil produk olahan kayu manis di Nagari Malalak Barat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Studi terkini menunjukkan bahwa peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan kelompok tani memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada komoditas pangan utama atau pertanian secara umum dan belum banyak yang mengkaji pemberdayaan berbasis komoditas spesifik seperti kayu manis, terutama yang dikelola oleh kelompok wanita tani di tingkat nagari. Di sisi lain, kajian tentang bagaimana pemerintah nagari mengintegrasikan tiga peran strategisnya sebagai regulator yang menetapkan aturan dan arah kebijakan, fasilitator yang menyediakan dukungan teknis dan akses, serta dinamisor yang mendorong partisipasi aktif masyarakat masih terbatas. Padahal, di Nagari Malalak Barat potensi kayu manis yang besar belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya hambatan seperti belum adanya legalitas produk, keterbatasan teknologi pengolahan, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan lemahnya jejaring pemasaran.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Nagari dalam memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT) penghasil produk olahan kayu manis di Nagari Malalak Barat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dengan fokus pada komoditas kayu manis, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan kapasitas, legalitas, dan pemasaran produk olahan berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan peran pemerintah nagari Malalak Barat dalam memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT) penghasil produk olahan kayu manis, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses pemberdayaan tersebut. Penelitian dilaksanakan di Nagari Malalak Barat, Kabupaten Agam, dengan objek penelitian berupa pelaksanaan program, kebijakan, dan strategi pemberdayaan yang dijalankan pemerintah nagari terhadap KWT.

Informan dalam penelitian ini meliputi Wali Nagari Malalak Barat, Badan Musyawarah Nagari Malalak Barat, Anggota KWT. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilaksanakan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dari beragam informan, dokumen resmi pemerintah nagari, serta hasil observasi lapangan.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:246), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data digunakan untuk menyeleksi informasi relevan sesuai fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan kutipan wawancara,

sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai peran Pemerintah Nagari Malalak Barat dalam pemberdayaan KWT penghasil produk olahan kayu manis. Dengan metode ini, Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran menyeluruh terkait efektivitas strategi pemberdayaan yang telah diterapkan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemerintah nagari Malalak Barat memainkan tiga peran utama dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) penghasil produk olahan kayu manis, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Adapun peran Pemerintah Nagari Malalak Barat dalam upaya pemberdayaan Kelompok Wanita Tani pengolah kayu manis dapat dilihat dari beberapa indikator yang dikemukakan (Musa, 2017) sebagai berikut:

Pemerintah Nagari sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah nagari menetapkan kebijakan dan aturan yang mendukung kegiatan pemberdayaan, meskipun regulasi khusus yang mengatur pengembangan produk turunan kayu manis belum tersedia. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap produk dan proses produksi, termasuk dalam aspek sertifikasi halal dan izin edar. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sarman et al. (2025) bahwa belum optimalnya peran pemerintah desa disebabkan ketiadaan Perdes yang komprehensif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sejalan juga dengan temuan Winarti et al. (2025) bahwa keterbatasan regulasi dan program berkelanjutan dari pemerintah lokal menjadi penghambat utama pemberdayaan istri petani.

Pemerintah Nagari sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah nagari telah memfasilitasi kegiatan pelatihan, menghubungkan KWT dengan pihak ketiga seperti dinas terkait, serta membantu pemasaran produk dalam event pameran. Namun, frekuensi pelatihan yang terbatas dan tidak berkelanjutan membuat peningkatan kapasitas anggota KWT berjalan lambat.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Wahyudin et al. (2023) bahwa pemerintah desa berperan penting sebagai fasilitator dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui strategi berbasis potensi lokal dan penyediaan sarana-prasarana. Sejalan pula dengan temuan Rumondor et al. (2022) bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan, pembinaan, dukungan teknis, serta memfasilitasi akses pasar dan teknologi untuk keberlanjutan usaha.

Pemerintah Nagari sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah nagari berperan menggerakkan partisipasi masyarakat dan mendorong inisiatif KWT untuk memanfaatkan potensi kayu manis. Sebagai dinamisator, pemerintah menggerakkan partisipasi anggota melalui motivasi, pembinaan, dan pelibatan dalam kelembagaan ekonomi nagari. Hal tersebut selaras dengan temuan Windasai et al. (2021) bahwa pemerintah berperan memberikan pembinaan dan arahan berkesinambungan kepada masyarakat untuk menjaga partisipasi dan keberlanjutan pembangunan. Selaras juga dengan temuan Merchy (2018) bahwa pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat serta membangkitkan semangat mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Faktor Pendukung Pemerintah Nagari dalam Memberdayakan Kelompok Wanita Tani Penghasil Produk Olahan Kayu Manis di Nagari Malalak Barat

Ketersediaan sumber daya alam yakni kayu manis menjadi modal utama pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Nagari Malalak Barat, sejalan dengan temuan Irham (2024) yang menyatakan sumber daya alam berperan penting dalam perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat. Motivasi tinggi anggota kelompok memperkuat kemampuan pengelolaan usaha dan meningkatkan peluang keberhasilan, hal ini sejalan dengan temuan Gemina et al. (2022).

Komunikasi efektif dan partisipatif antara kelompok dan pemerintah nagari turut mendukung pemberdayaan, sebagaimana ditegaskan Muhaemin & Hasanah (2024). Penguatan kelembagaan melalui integrasi dengan BUMNag memperkuat keberlanjutan usaha, sejalan dengan hasil penelitian Christyana & Mutmainah (2023) yang menegaskan peran penting BUMDes dalam memperkuat UMKM secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat Pemerintah Nagari dalam Memberdayakan Kelompok Wanita Tani Penghasil Produk Olahan Kayu Manis di Nagari Malalak Barat

Faktor penghambat pemberdayaan KWT meliputi ketiadaan bantuan modal dan alat produksi, promosi yang belum terstruktur, tidak adanya rumah produksi standar, serta rendahnya keterampilan teknis dan pemasaran digital akibat minimnya pelatihan.

Pengelolaan anggaran yang kurang matang dan keterbatasan akses modal menghambat pemberdayaan KWT. Hal ini sejalan dengan temuan Sinaga et al. (2022) menyatakan bahwa perencanaan anggaran yang kurang baik menyebabkan hasil pemberdayaan tidak optimal.

Ketiadaan peraturan desa yang mengatur secara khusus pemberdayaan masyarakat menyebabkan program pemberdayaan kurang berkesinambungan dan tergantung pada kebijakan pusat. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Raintung et al. (2021) yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Mobuya belum menetapkan peraturan khusus terkait kegiatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga upaya pemberdayaan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya secara umum.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi kendala dalam pengembangan kapasitas dan akses pelatihan. Hal ini selaras dengan temuan Winarti et al. (2025) mengatakan bahwasanya minimnya pelatihan rutin dari pemerintah lokal memperkuat ketergantungan pada program eksternal, sehingga pemberdayaan perempuan petani tidak optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, Peran Pemerintah Nagari Malalak Barat dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani penghasil produk olahan kayu manis mencakup fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Sebagai regulator, peran pemerintah masih terbatas pada pembentukan KWT melalui Surat Keputusan Wali Nagari. Sebagai fasilitator, pemerintah memfasilitasi pembinaan teknis, promosi, dan kerja sama dengan pihak luar, namun masih terkendala dalam pemberian sarana prasarana, bantuan alat, dan modal. Sedangkan sebagai dinamisator, pemerintah menggerakkan partisipasi anggota melalui motivasi, pembinaan, dan pelibatan dalam kelembagaan ekonomi nagari.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan KWT meliputi ketiadaan bantuan modal dan alat produksi, promosi yang belum terstruktur, ketiadaan rumah produksi, serta rendahnya keterampilan teknis dan pemasaran digital akibat minimnya pelatihan. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Pemerintah Nagari Malalak Barat diharapkan bersama BUMNag dan dinas terkait dapat memprioritaskan pembangunan rumah produksi yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, serta melengkapi fasilitas pengolahan dan pengemasan agar produk KWT dapat memenuhi persyaratan sertifikasi. Selain itu, diharapkan juga penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan secara rutin, khususnya dalam peningkatan keterampilan pengolahan, manajemen usaha, dan pemasaran digital bagi anggota KWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Afifah, S. N., & Ilyas, I. (2021). "Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Asri". *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 54-70.
- Astuti, D. (2021). "Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat". *Ensiklopedia of Journal*, 3(3), 193-205.
- Christyana, N., & Mutmainah, N. F. (2023). Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 56-69.
- Ekadina, I. W., Budhi, M. K. S., Yasa, I. G. W. M., & Yuliarmi, N. N. (2022). "The effect of farmer empowerment, social capital and the role of the government on farmer productivity in the Simantri program in Bali province". *International journal of health sciences*, 6(S6), 191-198.
- Gemina, D., Silaningsih, E., & Yuningsih, E. (2016). Pengaruh motivasi usaha terhadap keberhasilan usaha dengan kemampuan usaha sebagai variabel mediasi pada industri kecil menengah makanan ringan priangan timur-Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 15(3), 297-323.
- Irham, F., Fauzan, R. G., & Pramasha, R. R. (2024). Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Muhaemin, A. M., & Hasanah, T. R. (2024). Membangun potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat: Studi kasus Kampung Ciboleger, Banten. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(1), 1-28.
- Mercy Efriyanti, K. (2018). Peran Pemerintah Desa dalam Pennaggulungan Kemiskinan Melalui Program Angkringan (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah).
- Musa. (2017). "Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan". *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), 107-125.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow". *Governance*, 1(2).
- Rumondor, A. M., Pangemanan, F. N., & Undap, G. (2023). Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Florikultura di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. *Governance*, 3(1).
- Sarman, S., Tohopi, R., & Nani, Y. N. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9).

- Sinaga, A. R. L., Sihombing, M., & Humaizi, H. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1209-1218.
- Wahyudin, W., Kuswana, D., & Herdiana, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1).
- Winarti, L., Maswadi, M., Permadi, R., & Juliyanto, L. (2025). Kondisi Eksisting Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani: Peran Gender dan Pemberdayaan Istri Petani. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11(1), 1227-1240.
- Windasai, W., Said, M. M. U., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793-804.
- Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.